

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

-----, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, 2007.

Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2009.

Jened, Rahmi, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Kurniawan, Faizal, *Perkembangan Hukum Perikatan Doktrin Unjustified Enrichment sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi untuk Mewujudkan Keadilan Berperikatan*, Inteligencia Media, Surabaya, 2017.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Perbandingan Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Jakarta, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

-----, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Miru, Ahmad *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Mulyana, Asep N, *Reformulasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2019.

Satrio, J, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Citra Aditya Bhakti, Bandung , 1995.

Simamora, Y. Sogar dkk, *Aspek Kontraktual Dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha*, Inteligencia Media, 2018.

Sutedi, Adrian, *Hukum pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Skripsi/Disertasi :

Samosir, Jefri Daniel *Tinjauan Yuridis Perubahan Pengaturan Peran dan Fungsi Badan Khusus Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Menurut Ketentuan Hukum Tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.

Laporan Tugas Akhir:

Hendric Hendrawan, *Analisis Cadangan Gas Indonesia Menggunakan Model System Dynamics*, **Laporan Tugas Akhir**, Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Eksplorasi Dan Produksi Universitas Pertamina, Jakarta, 2020.

Jurnal :

Cameron, Peter D, *Stabilisation in Investment Contracts and Changes of Rules in Host Countries: Tools for Oil & Gas Investors*, Association of International Petroleum Negotiators (AIPN), 2006.

Emeka, J. Nna, *Anchoring Stabilization Clauses in International Petroleum Contracts*, Vol. 42, No. 4, Winter 2008.

Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, 2006.

Oppusunggu, Yu Un, *Pertemuan Ilmu Hukum Dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum*, Law, Society & Development (LSD), Vol. II, No. 3, Agustus-November 2008.

Persia, Aziza Nur, *Studi Tentang Cadangan Penyangga Minyak (Cpm) Untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Indonesia*, Jurnal Ketahanan Energi, Volume 4, Nomor 2, 2018

Rumokoy, Nike K, *Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Minyak Dan Gas Bumi (Migas) Yang Terkandung Di Dalam Wilayah Hukum Pertambangan*

Indonesia Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 22, Nomor 5, Januari 2016.

Ruslina, Elli, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.

SKK Migas, Meningkatkan Investasi Menuju Produksi 1 Juta BOPD, Laporan Tahunan SKK Migas, 2019.

Stephen L. Magiera, *International Investment Agreements and Investor-State Disputes: A Review and Evaluation for Indonesia*, ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2016-30, 2016.

Surajiyo, Manusia Susila Di Indonesia Dalam Prespektif Filosofis, Jurnal Humoniora, Volume XXI, Nomor 2, 2020.

Umirdinov, Alisher, The End Of Hibernation Of Stabilization Clause In Investment Arbitration: Reassessing Its Contribution To Sustainable Development, Denver Journal Of International Law and Policy, Volume 43, Number 4, April 2020.

UNCTAD, State Contracts Unctad Series On Issues In International Investment Agreements, UNITED NATIONS New York and Geneva, 2004.

Wahyuni, Sri, Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2070).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996).

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24).

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1993 Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gains (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1993 Nomor 101).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Perjanjian Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 714) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir

Perjanjian Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 544).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil *Gross Split* yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 780).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169).

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Putusan Pengadilan Pajak, Nomor PUT-102925.36/2011/PP/M.XIIIA Tahun 2019